

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM
JABATAN**

**(Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo
Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Gelar
Sarjana Hukum
Bagian Pidana**

OLEH :

**MERRY IRIANI SORTHAK
191270004**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

2022

***JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION
AGAINST ABUSE OF AUTHORITY IN OFFICE
(Study of Decision Number 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Decision
Number 01 PK/Pid.sus/2019)***

SCRIPTION

***To Meet the Requirements for Pursuing a Law Degree
Criminal Section***



BY:

***MERRY IRIANI SORTHAK
191270004***

***FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE
LEGAL STUDY PROGRAM
SATYA STATE UNIVERSITY OF INDONESIA***

2022

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : MERRY IRIANI SORTHAK
NIM : 191270004
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PEMINATAN : PIDANA
JUDUL : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus - TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019) "

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi.

Jakarta, 09 Februari 2022

Disetujui oleh,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Efan Setiadi, S.H, M.H)

(Catherin L.Tobing, S.H, M.Hum)

Mengetahui,

Dekan FISIP,

Kaprodi Hukum,

(Drs. Solten Rajagukguk., M.M)

(Ditta Giarni Martha, S.H., M.H)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

**TANDA PENGESAHAN PENGUJI
(SIDANG AKHIR)**

NAMA : Merry Iriani Sortha K
NIM : 191270004
JUDUL : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap
Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor
01/Pid.Sus TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01
PK/Pid.sus/2019)"

PROGRAM STUDI : Hukum

PEMINATAN : Pidana

Jakarta, 09 Februari 2022

Menyetujui,

Ketua Penguji Efan Setiadi, S.Kom., S.H., M.H. (.....)

Penguji I Dr., Fitra Deni, S.H., M.Si (.....)

Penguji II Devarita, S.H., M.H., M.Kn (.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum,

Dekan FISIP,


Ditta Giarni Martha, S.H., M.H.


Drs. Solten Rajagukguk., M.M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merry Iriani Sortha K

NIM : 191270004

Jenjang : S1

Prodi : Hukum

Jurusan : Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Jakarta, 02 Februari 2022

Yang menyatakan



Merry Iriani Sortha K
NIM. 191270004

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN

**(Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor
01 PK/Pid.sus/2019)**

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dan terus meningkat setiap tahunnya, dimana perbuatan tindakan korupsi sering kali terjadi disebabkan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik menggunakan wewenang yang tidak terikat ataupun menggunakan wewenang yang terikat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dipelajari secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019) pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, karena perbuatannya yang menguntungkan diri sendiri ini dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga merugikan negara serta dapat dijatuhkan pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang dan Penjatuhan pidana

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION AGAINST ABUSE OF AUTHORITY IN OFFICE

***(Study of Decision Number 01/Pid.Sus - TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Decision Number 01
PK/Pid.sus/2019)***

The crime of corruption in Indonesia has been widespread and continues to increase every year, where acts of corruption often occur due to abuse of authority in office, either using unbound authority or using bound authority. This study aims to understand the basis of judges' considerations and criminal responsibility in imposing sanctions on Decision Number 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Jo Decision Number 01 PK/Pid.sus/2019. This research is a normative legal research, with the sources of legal material being primary and secondary legal materials, using a statutory approach and a case approach, then studied descriptively using deductive and inductive methods to answer the problems studied. Based on the research that the author did on the Juridical Review of Corruption Crimes Against Abuse of Authority in Position (Study of Decision Number 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Decision Number 01 PK/Pid.sus/2019) the perpetrators can be requested criminal responsibility, because of his actions that benefited himself and was proven to have violated Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, thereby causing losses to the state and criminal penalties could be imposed.

Keywords: *Corruption, Abuse of Authority and Criminal Imposition*